



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **YOGI GUMILAR**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KUPANG**
3. NHK : **473266**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 820.465.000**

1. Tanah Seluas 2.681 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, Rp. 41.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 146 m2/125 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA PACITAN, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 164 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, Rp. 21.000.000
5. Tanah Seluas 778 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, Rp. 32.000.000
6. Tanah Seluas 171 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, Rp. 2.565.000
7. Tanah Seluas 2.310 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 438.900.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 10.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 328.345.000**

D. SURAT BERTHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 95.957.434**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.254.767.434**

III. HUTANG **Rp. 185.322.069**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

1.069.445.365

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.